



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/KEP.289-HUK/VI/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/KEP.25-HUK/I/2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 dan dengan adanya usulan tambahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.25-Huk/I/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026, perlu diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 100.3.2/Kep.25-Huk/I/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/KEP.25-HUK/I/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/KEP.111-HUK/II/2026 tentang Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

3. Berita Acara Rapat Nomor 100.3./BA. 336.1/SETDA.Huk tanggal 17 Juni 2026 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 100.3.2/Kep.25-Huk/I/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026.

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yakni mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juni 2026
WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

- Tembusan Yth :
- 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
 - 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 - 3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 100.3.2/KEP.289-HUK/VI/2026
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR :
 100.3.2/KEP.25-HUK/I/2026 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 KEPALA DAERAH TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

NO	JUDUL	PERANGKAT DAERAH
1	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara terintegrasi Patriot secara terintegrasi patriot corporate university di instansi Pemerintah Daerah Kota Bekasi	
3	Coaching dan Mentoring Aparatur Pemerintah Kota Bekasi	
4	Pedoman Penyelenggaraan Magang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
5	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
6	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71.A Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
7	Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
8	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Disiplin Pegawai (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
9	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Bagian Organisasi
10	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
11	Nomenklatur dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
12	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi	

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

13	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
14	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi
15	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi
16	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
17	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air Kota Bekasi
18	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi
19	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
20	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
21	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
22	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
23	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
24	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi
25	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
26	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
27	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

28	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
29	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	
30	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	
31	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	
32	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi	
33	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi	
34	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi	
35	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	
36	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	
37	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi	
38	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	
39	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	
40	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi	
41	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi	
42	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota	

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

	Bekasi	
43	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	
44	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	
45	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
46	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	
47	Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi	Dinas Tata Ruang
48	Garis Sempadan	
49	Penerapan Indeks Hijau Biru Indonesia di Kota Bekasi	
50	Pedoman Pengesahan Persetujuan Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) dan/atau Rencana Tapak (<i>Siteplan</i>)	
51	Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Bangunan Fungsi Usaha Yang Melampaui Koefisien Dasar Bangunan Dan Kekurangan Koefisien Dasar Hijau	
52	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
53	Tata Cara Pengawasan dan Inspeksi Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Bekasi	
54	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	
55	Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan	Inspektorat Daerah
56	Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
57	Pengelolaan Konflik Kepentingan	
58	Petunjuk Teknis Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>	

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

59	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dilingkungan Dinas Kesehatan dengan Pihak Lain	Dinas Kesehatan
60	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Bekasi Tahun 2025-2029	
61	Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi	
62	Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan	
63	Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	
64	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	
65	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah
66	Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak Daerah	
67	Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
68	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
69	Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) & Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara Elektronik	
70	Pengawasan Terhadap Kegiatan Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online	
71	Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG)	
72	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
73	Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah	
74	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Reklame	
75	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
76	Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan	
77	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

78	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2027	Daerah
79	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026	
80	Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2027	
81	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
82	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	
83	Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	
84	Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	
86	Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	
87	Pengelolaan Keuangan	
88	Standar Harga Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah	
89	Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	
90	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
91	Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain	
92	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	
93	Tata Cara Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah	
94	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	
95	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

96	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
97	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
98	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi	
99	Pos Pelayanan Terpadu	
100	Tata Cara Penanganan Anak dari Tindakan Kekerasan Perdagangan dan Eksploitasi	
101	Pembentukan tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2026-2030	
102	Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
103	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Reklame	
104	Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
105	Pengurangan Sampah di Sumber Timbulan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
106	Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan	
107	Dewan Pendidikan	Dinas Pendidikan
108	Rintisan Pendidikan Swasta Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Gratis	
109	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026	Bagian Administrasi Pembangunan Setda
110	Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2027	
111	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bekasi	
112	Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	
113	Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Bekasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
114	Penugasan PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam Pengelolaan Pasar Baru Kota Bekasi	Bagian Perekonomian
115	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
116	Pelaksanaan Dukungan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

117	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	
118	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
119	Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
120	Kode Etik Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
121	Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
122	Komite Penataan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO